Meningkatnya layanan pemerintahan berbasis digital dan terintegrasi
IK : Indeks SPBE

Meningkatnya Layanan Publik berbasis digital dan terintegrasi
IK : Persentase Layanan Publik Online dan Terintegrasi

Meningkatnya Kualitas Penerapan Digitalisasi Pemerintahan
IK : Persentase Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah
IK : Persentase penerapan sistem elektronik dalam layanan publik

Meningkatnya Pengelolaan E-Goverment
IK : Presentase ketersediaan aplikasi pemerintahan dan layananan publik

Terlaksananya Pengembangan Aplikasi Khusus sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah
IK : Jumlah aplikasi khusus yang dikembangkan

Meningkatnya Penerapan Nama Domain dan Sub Domain pemerintah Daerah
IK : Presentase penerapan domain go.id / sub domaian pada aplikasi administrasi pemerintahan dan layanan public

Tersedianya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain website/aplikasi
IK : Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain website/aplikasi

Terselenggaranya Jaringan Intra Pemerintah Daerah
IK : Jumlah perangkat daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik
IK : Persentase Tindak lanjut Penanganan Pengaduan
IK : Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik

IK : Persentase diseminasi dan layanan informasi publik sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)
IK: Persentase komunitas masyarakat /mitra strategis pemerintahan daerah yang

Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
IK : Persentase masyarat yang mengaksess penyebaran informasi publik

Terlaksananya Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
IK : Jumlah Komunitas Informasi Masyarakat yang aktif

Terkelolanya Pelayanan Informasi Publik
IK : Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan

Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
IK : Jumlah rekomendasi Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik

Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik
IK : Jumlah media komunikasi publik yang dikelola

Terlaksananya Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik
IK : Jumlah SDM bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek

Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang akurat dan dapat diandalkan
IK :Indeks Pembangunan Statistik

Meningkatnya permanfaatan data statistik daerah
IK : Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan

Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral
IK : Persentase Data statistik yang terpublikasi tepat waktu **menggunakan sistem elektronik**

Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektoral
IK : Persentase Data Sektoral yang memnuhi prinsip SDI

Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup daerah Kabupaten/Kota
IK : Presentase survey statistik sektoral yang mendapat

Tersusunnya metadata statistik sektoral.
IK : Jumlah dokumen metadata kegiatan statistik sektoral yang tersusun

Terlaksananya Peningkatan kapasitas SDM Pengelola data statistik sektoral
IK : Jumlah SDM yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM

Meningkatnya keamanan informasi
IK : Presentase Tingkat Keamanan Infromasi Pemerintah Daerah (Indeks KAMI)

Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap Kebijakan Keamanan Informasi
IK : Nilai kepatuhan Perangkat Daerah terhadap kebijakan keamanan informasi

Meningkatnya Layanan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
IK : Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Meningkatnya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah daerah Kabupaten/Kota
IK : Kepatuhan OPD terhadap penerapan persandian untuk pengamanan informasi pemerintsh

Meningkatnya Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah
IK : Persentase penerapan pola hubungan komunikasi sandi

Terwujudnya Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
IK : Jumlah Perangkat Daerah terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi

Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
IK : Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang

Terlaksananya Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
IK : Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
IK : Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

Tersedianya Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
IK : Jumlah perangkat daerah yang menggunakan Sertifikat Elektronik